



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8249-8255

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam mengembangkan Potensi Hutan Bakau Sebagai Wisata Alam di Pantai Permata Probolinggo

Husni Mubarog^{1✉}, Eko Yudianto Yunus², Diska Cintya Veredila³

Universitas Panca Marga

Email: diskacv38@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Potensi alam yang unik dan khas pada umum diorientasikan sebagai asset wisata. Alasannya pariwisata sebagai bentuk industry yang strategis guna membangun aspek sosial dan ekonomi, bahkan sebagai pelestarian budaya. Potensi alam yang besar dan khas wilayah pesisir adalah hutan mangrove atau bakau. Hal ini menggerakkan Pemerintah Daerah mengorientasikan pengelolaan hutan bakau sebagai pariwisata yang memuat kelestarian alam secara berkelanjutan. Terutama di Kota Probolinggo terdapat area Pantai dan Pesisir dengan potensi hutan Bakau, salah satunya di Pantai Permata. Hal ini menarik untuk diteliti khususnya untuk mengetahui peran pemerintah Kota Probolinggo yang di wakikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam mengembangkan wisata hutan bakau di Pantai Permata Pilang. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Focus riset dengan orientasi peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam pengembangan hutan bakau Pantai Permata Pilang menjalankan peran regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Kata Kunci: *Kata Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Pengembangan, Lingkungan*

Abstract

Unique and distinctive natural potential is generally oriented as a tourist asset. The reason is that tourism is a strategic form of industry to build social and economic aspects, even as cultural preservation. The great natural potential and typical of coastal areas is mangrove forests or mangroves. This moves the Regional Government to orient the management of mangrove forests as tourism that contains natural sustainability in a sustainable manner. Especially in Probolinggo City, there are beach and coastal areas with mangrove forest potential, one of which is Permata Beach. This is interesting to study, especially to find out the role of the Probolinggo City government represented in the Probolinggo City Youth, Sports and Tourism Office in developing mangrove forest tourism at Permata Pilang Beach. Research with descriptive qualitative methods. Focus research with the orientation of the government's role as Regulator, Dynamizer, and Facilitator. The results showed that the role of the Department of Youth, Sports and Tourism of Probolinggo City in the development of mangrove forests at Permata Pilang Beach played the role of regulator, dynamizer, and facilitator.

Keywords: *The Words Regulator, Dynamizer, Facilitator, Development, Environment*

PENDAHULUAN

Pengelolaan potensi alam memiliki peranan dalam pembangunan daerah (Komariah et al., 2018). Potensi alam yang unik dan khas pada umum diorientasikan sebagai asset wisata (Girindra, 2020). Sehingga wilayah yang memiliki potensi alam yang khas akan merawat dan mengelola potensi alam dengan baik untuk menjadi pariwisata daerah. Pemerintah akan turun langsung untuk mengelola area pariwisata tersebut agar menarik perhatian wisatawan (Alfiannur & Burhanduin, 2022). Alasannya pariwisata sebagai bentuk industry yang strategis guna membangun aspek sosial dan ekonomi, bahkan sebagai pelestarian budaya.

Salah satu potensi alam di Indonesia yang dijadikan area pariwisata adalah hutan mangrove (Rijal et al., 2020). Di Indonesia luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 Juta Ha, namun 52% atau 1,82 juta Ha bakau Indonesia dalam kondisi rusak. Hutan mangrove atau hutan bakau tidak hanya sebagai potensi alam biasa, namun memiliki fungsi sebagai habitat bagi beragam spesies. Fungsi lainnya adalah sebagai bentuk pelestarian alam yang mencegah terjadinya abrasi pantai.

Khususnya pada saat ini, Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutan. Artinya tidak hanya memanfaatkan potensi alam tapi mengutamakan kelestarian alam. Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan dan wisata alam yang berkaitan dengan hutan bakau adalah model ekonomi biru (Fitria & Supriyanto, 2023). Konsep ekonomi biru pada hutan bakau tidak hanya pemanfaatan fisik saja namun memperhatikan kelestarian mulai dari menjaga dari pencemaran, kerusakan, dan lainnya.

Pengembangan wisata hutan bakau tidak dapat berjalan sendiri, namun perlu peran dari Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, dan pihak swasta untuk bekerjasama dengan baik. Khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan wilayah sendiri sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan daerahnya (Djadjuli, 2018). Beberapa daerah sudah mewujudkan hal tersebut dengan peran pemerintah daerah secara optimal. Seperti pada penelitian terdahulu oleh Nawawi et al. (2017) menunjukkan bahwa peran pemerintah pertama adalah pembentukan kebijakan dalam tata kelola mangrove. Peran kedua adalah pelaksanaan kebijakan dalam tata kelola mangrove. Penelitian lainnya oleh Krisifu & Pattiwael (2024) yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengembangka objek wisata mangrove di Klawalu mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, penerapan kebijakan, serta sebagai fasilitator.

Kota Probolinggo juga ikut aktif dalam pengembangan wisata hutan mangrove atau hutan bakau di seluruh pantai Kota Probolinggo (Supriyanto & Fitria, 2022). Salah satunya adalah pengembangan wisata hutan bakau di Pantai Permata Pilang. Pantai Permata Pilang memiliki panjang 7 km dan sebagian di tumbuh bakau. Konsep Wisata Pantai Permata Pilang dikhususkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui 3 pilar yang diutamakan meliputi konservasi, rekreasi wisata, dan edukasi. Pantai Permata Pilang merupakan objek wisata yang pengelolaannya diserahkan pada Kelompok Sadar Wisata dan pada naungan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian mendalam untuk mengetahui peran pemerintah Kota Probolinggo yang di wakikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam mengembangkan wisata hutan bakau di Pantai Permata Pilang.

METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan metode riset secara kualitatif. Menurut (Moleong, 2018), menjelaskan teori dari Bodgan dan Taylor merupakan prosedural riset membentuk data deskriptif. Penelitian dilakukan di Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo. Data dihimpun dari metode triangulasi meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan langsung oleh penulis (Sugiyono, 2018). Data dihimpun dengan berkala untuk memperoleh keabsahan data dengan penarikan intisari dan diverifikasi selama proses penelitian.

Focus riset merupakan peran pemerintah dalam pengembangan Wisata Hutan Bakau di Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo. Teori yang digunakan adalah teori peran pemerintah oleh Yusuf (2014) dalam Arifin (2021) meliputi peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil riset dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Iyas Yusuf (2014) meliputi tiga peran pemerintah menunjukkan

a. Regulator

Peran pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) Kota Probolinggo menyelenggarakan pengembangan hutan bakau sesuai dengan kebijakan, baik dari Undang-undang hingga Perwali Kota Probolinggo. Dispopar Kota Probolinggo bergerak sesuai landasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 17 Nomor 50 Tahun 2011 terkait Rencana Induk Pembangunan Keperawisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025. Dispopar Kota Probolinggo bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Probolinggo dalam pembangunan dan mengembangkan sarana prasarana di Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo.

Bentuk kerjasama dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DUPRPKR) Kota Probolinggo yang merenovasi sarana jalan menuju arah pantai. Jalan direnovasi dengan model jalan paving. Sementara pembangunan oleh anggaran Dispopar difokuskan pada kelengkapan prasarana seperti mushola, kamar mandi, fasilitas air bersih, tempat sampah. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo membangun 10 unit gazebo sebagai fasilitas pendukung yang lebih ramah keluarga. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo Bersama POKDARWIS sebagai pengelola melaksanakan CSR secara bertanggung jawab. Wujud CSR diorientasikan ada dukungan wisata meliputi memfasilitasi toilet, gazebo, kedai kuliner, ayunan dan spot foto yang ada di pantai permata. Tentu pelaksanaan kerjasama dan CSR ini disesuaikan dengan aturan baik dari anggaran, konsep kerjasama, dan model pembangunan yang tepat dan tidak merusak lingkungan dan aman untuk wisatawan.

b. Dinamisator

Peran pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) Kota Probolinggo menyelenggarakan pengembangan hutan bakau dengan bentuk bekerjasama dengan aktor terkait dalam pengembangan Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo. selama ini untuk pengembangan pantai permata ini memang kita bekerjasama bukan hanya pada sektor satu itu saja tapi kita juga lintas sektor artinya disini karena pantai permata ini kewenangannya masih ada di provinsi akhirnya kita juga bekerjasama dengan pihak provinsi dalam hal ini adalah DKP, kita juga bekerjasama dengan KSOP yang memang mempunyai jalur kewenangan disana juga dan mempunyai kepentingan KSOP ini artinya apa disana adalah ada jalur pelayaran yang ada

secara aturan itu masuk kedalam KSOP, kemudian DKP Provinsi kaitannya dengan kewenangan karena apa karena dengan adanya undang-undang No. 23 Tahun 2014 nol pantai itu sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi, makanya kenapa sampai dengan saat ini pantai permata itu belum dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo tetapi mereka adalah berbasis pemberdayaan masyarakat, masyarakat siapa yaitu masyarakat Kota Probolinggo yang ada di wilayah itu jadi mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada di pantai permata itu untuk menjadi suatu atraksi yang menarik dikunjungi oleh wisatawan. Koordinasi juga bukan lintas sektor saja tetapi kita juga dengan OPD terkait yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo ini misalnya ada BAPPEDA terkait tata ruangnya, kemudian ada DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo) terkait infrastrukturnya, kemudian dengan perizinan, kalau sudah keluar seluruh sertifikat dan sebagainya otomatis kita mengajukan izin ini perannya DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo) untuk mengawal perizinan yang ada di pantai permata, adapun juga dengan DLH terkait dengan lingkungan yang ada di pantai permata jadi ini kompleks ya kita juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di pantai permata yaitu POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang berjumlah 17 anggota tugasnya mengurus objek wisata pantai permata , POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) berjumlah 20 anggota untuk menjaga dan melindungi terkait tumbuhan laut dan lahan pantai permata, sehingga mereka berkolaborasi mengembangkan pantai permata itu, tetapi tetap dibawah pembinaannya UPD terkait seperti misalnya POKDARWIS itu dibawah DISPOPAR, POKMASWAS dibawahnya DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (DISBUDPAR). Kerjasama dengan DISPOPAR dilaksanakan melalui komunikasi langsung atau komunikasi di media sosial yang berbentuk juga ada bantuan dari DISPOPAR. Serta ikut serta dalam kegiatan dan ada dukungan dari DISPOPAR sesuai arahan dan sarannya. Seperti kegiatan dari luar ijin ke DISPOPAR akan dihubungkan pada POKDARWIS untuk pengembangan dan promosi Pantai Permata Pilang. Khususnya POKDARWIS Pantai Permata Pilang bagian dari binaan DISPOPAR.

c. Fasilitator

Peran pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kota Probolinggo menyelenggarakan pengembangan hutan bakau dengan menjalankan fungsi utama sebagai Lembaga yang melaksanakan sekaligus mengawasi. Saat ini sarana dan prasarana yang sudah diberikan DISPOPAR yaitu memfasilitasi mushola, air bersih, pengelola limbahnya, kemudian kita juga berkerja sama

dengan CSR , penyediaan toilet, kemudian pengelola sampah dan disana sudah ada tempah, ini yang sudah disediakan oleh DISPOPAN di pantai permata Kota Probolinggo termasuk kita pemasangan banner dan fasilitas DISPOPAN juga mengadakan program untuk POKDARWIS seperti program pembinaan dan pelatihan SDM setiap tahunnya seperti pelatihan tata kelola, pelatihan manajemen pemasaran dan pelatihan pengembangan atraksi Adapun pelatihan dan pembinaan juga diselenggarakan oleh OPD-OPD yang terkait dengan tema destinasi wisata. Selain itu Dispopan menjalankan fungsi sebagai penyedia pelatihan setiap akhir tahun. Bahkan pelatihan hingga keluar kota, seperti ke Bondowoso studi banding dan di Tahun 2023 pembinaan secara teori di Pasebansena seperti paparan teori kepariwisataan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam pengembangan hutan bakau Pantai Permata Pilang menjalankan peran regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran Dispopan sebagai regulator dengan mengedepankan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 17 Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Keperawisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025. Peran Dispopan sebagai dinamisator dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DUPRPKR) Kota Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, dan POKDARWIS Pantai Permata Pilang. Sementara Peran Dispopan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana prasarana dan membina masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiannur, D., & Burhanduin. (2022). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengembangkan Pariwisata Hutan Mangrove di Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1).
- Arifin, M. S. (2021). Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi Dalam Pemberdayaan Peternak Ikan Hias Di Kecamatan Rawalumbu. *Pandita*, 4(1).
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Fitria, N. J. L., & Supriyanto. (2023). Pemberdayaan Peningkatan Sadar Wisata Pelabuhan Melalui Konsep Ekonomi Biru dan Orientasi Potensi Lokal. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 4(1), 190–205. <https://doi.org/10.33369/kreativasi.v2i2.28676>
- Girindra, I. A. G. (2020). Sendang Biru Tourism Penciptaan Value Creation Sebagai

- Optimalisasi Pengembangan Potensi Wisata Bahari Berbasis Penta Helix Model. *Jurnal Widya Publika*, 8(2), 142–162. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.646>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Krisifu, J. E. A. C., & Pattiwael, M. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Kawasan Objek Wisata Hutan Mangrove Kelurahan Klawalu Kota Sorong. *Jurnal Agribisnis*, 17(1).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Z. H., Alamsyah, A., & Hasan, I. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove (Studi Terhadap Pengelolaan Mangrove di Lantebung). *Sulesana*, 11(2).
- Rijal, S., Zainal, F. A., & Badollahi, M. Z. (2020). Potensi Hutan Mangrove Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Kasus Pada Hutan Mangrove Idaman Kec. Tarawang, Kab. Jenepono, Prov. Sulawesi Selatan). *PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event*, 2(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Supriyanto, & Fitria, N. J. L. (2022). Modal Sosial Dan Potensi Wisata Dalam Pengembangan Kompleks Pariwisata Pelabuhan Kota Probolinggo Berbasis Masyarakat Pendahuluan lokal dengan melibatkan norma dan nilai sebagai fasilitasi serta menciptakan kolaborasi dapat mudah serta cepat teratasi tanp. *Entita*, 4(2).